

**PELANGGARAN HAM DALAM KERJASAMA EKSPLORASI MINERAL  
ANTARA KONSORSIUM PERUSAHAAN CHINA  
DAN PEMERINTAH KONGO**  
*(Human Rights Violation in the Mining Exploration Cooperation between Chinese  
Consortium Companies and the Government of Democratic Republic of Congo)*

Witri Elvianti, Dibyana Galih Prakasita  
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Humaniora  
Universitas Presiden  
[witrielvianti@president.ac.id](mailto:witrielvianti@president.ac.id)

**ABSTRACT**

*China's economic bilateral cooperation with the Democratic Republic of Congo (DRC) has been agreed through a Collaboration Agreement in 2008. China's government previously had promised that such cooperation would bring benefits to the improvement of the welfare of local population through infrastructures in Congo. However, the agreement causes controversy due to the probability of human rights violations by Chinese mining companies. This study was designed as qualitative research and aimed at analyzing whether or not human rights perspective appeared on PRC-Kongo Collaboration Agreement 2008. Using content analysis technique, data collection is done through analysis from the Cooperation Agreement. It found that although China has shown its commitment to support human development in Africa, this commitment does not appear on China's Collaboration Agreement with Congo. It also argues that the outcome of mineral mining for infrastructure does not suit a win-win solution so that it deteriorates human development in Congo. Furthermore, China's mining companies seem to neglect the risk of employing children as its cheap labour, which potentially worsen China's commitment on human rights. It also analyzed that China perceived its national strategic plan as the priority rather than the universal principle of human rights.*

**Keywords:** *China; child labor; mineral exploration; Kongo.*

**ABSTRAK**

Kerjasama ekonomi bilateral China dengan Republik Demokratik Kongo (Kongo) telah disepakati melalui *Collaboration Agreement* pada tahun 2008. Pemerintah China menjanjikan bahwa kerjasama tersebut akan membawa manfaat bagi kesejahteraan penduduk lokal melalui pembangunan infrastruktur di Kongo. Meskipun demikian, perjanjian kerjasama tersebut justru menuai kontroversi dikarenakan beberapa analisis yang menunjukkan adanya pengabaian terhadap perlindungan HAM di Kongo oleh perusahaan konsorsium China. Kajian ini didesain dengan metode penelitian kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis apakah Perjanjian Kolaborasi PRC-DRC 2008 sesuai dengan prinsip HAM universal. Dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*), peneliti mengumpulkan data dengan menelaah isi dari perjanjian kerjasama tersebut. Ditemukan bahwa meskipun pemerintah China menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan manusia di Afrika namun komitmen tersebut justru tidak muncul dalam Perjanjian Kolaborasi yang memayungi kerjasama bilateral China dan Kongo dalam eksplorasi mineral. Tulisan ini juga mengemukakan bahwa hasil penambangan mineral untuk infrastruktur tidak sesuai dengan *win-win solution* yang kemudian dapat memperburuk pembangunan manusia di Kongo. Perusahaan pertambangan China yang tampak mengabaikan risiko mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja murah berpotensi memperburuk komitmen China pada hak asasi manusia. Dianalisis dari sisi kepentingan nasional China, kepentingan bisnis dan perdagangan tetap menjadi prioritas utama daripada kepatuhan pada prinsip universal hak asasi manusia.

**Kata kunci:** *Pemerintah China; pekerja anak; eksplorasi mineral; Pemerintah Republik Demokratik Kongo.*

## PENDAHULUAN

Korelasi antara industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah lama menimbulkan perdebatan.<sup>1</sup> Setiap keputusan yang diambil di tingkat negara atau supra-negara seharusnya memang ditujukan untuk memenuhi hak dasar manusia, di antaranya adalah hak ekonomi dan hak sosial. Keputusan untuk membentuk *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 menggarisbawahi kesadaran negara bangsa dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui penggabungan indikator sosial ekonomi dalam pembangunan manusia. Penggabungan tersebut dapat dilihat dari dua bentuk hubungan yang saling berantai. Kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kualitas hidup manusia saling berkaitan satu sama lain apabila keputusan ekonomi tersebut diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip umum hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Berangkat dari pemikiran tersebut, negara-negara berkembang saling berkompetisi untuk meningkatkan kegiatan ekonominya dengan asumsi agar dapat meningkatkan kualitas standar hidup masyarakat. Bahkan bank dunia pun ikut membenarkan bahwa pembangunan manusia sejalan dengan tujuan HAM yang keduanya berpotensi menawarkan nilai bagi pembangunan ekonomi baru.<sup>3</sup> Perlindungan HAM berada sejajar dengan pencapaian pembangunan manusia karena keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebebasan berdasarkan martabat yang melekat dan kesetaraan semua orang.

Selain itu, menurut “Prinsip-Prinsip Panduan” tentang penilaian dampak HAM dari

perjanjian perdagangan dan investasi nomor A / HRC / 19/59 / Add.5 oleh badan Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa “...*the duty of all States to cooperate towards the full realization of human rights under the Charter of the United Nations...*” bahkan lebih lanjut ditegaskan kewajiban negara bahwa “*States cannot ignore their human rights obligations in the conclusion of trade or investment agreements, whether at the multilateral or bilateral level.*” Prinsip tersebut kembali menegaskan bahwa persoalan HAM harus dibicarakan secara berdampingan dengan kegiatan perekonomian suatu negara baik secara bilateral maupun multilateral.

Dalam hal ini, China merupakan salah satu negara dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur terbesar yang juga secara aktif meningkatkan investasi asing langsung di banyak negara berkembang lainnya. Selain itu, China memiliki catatan historis yang cukup menarik dikarenakan keterlibatannya dalam merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Deklarasi ini merupakan standar utama yang diterapkan secara universal oleh negara-negara untuk mempromosikan hak asasi manusia dalam setiap aktivitas yang dilakukan termasuk kegiatan dalam bidang ekonomi.<sup>4</sup> Lebih daripada itu, secara khusus China juga meratifikasi konvensi lain yang juga menyokong perjuangan perlindungan hak asasi manusia, salah satunya adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*), yang menyusun standar bagaimana negara harus menempatkan, memandang dan menegakkan hak anak..<sup>5</sup>

Melalui pencapaian “*Made in China*” pada tahun 2025, China akan mengalami transformasi

---

1 Richard Bernal, “The Great Depression, Colonial Policy And Industrialization in Jamaica,” *Social and Economic Studies* 37, no. 1/2 (1988): 33–64.  
2 Alejandro Ranis, Gustav Stewart, Frances Ramirez, “Economic Growth and Human Development,” *World Development* 28, no. 2 (2000): 197–219.  
3 World Bank, “China’s Product Export to Middle East and North Africa,” *World Integrated Trade Solution*, last modified 2013, accessed September 20, 2020, <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2013/TradeFlow/Export/Partner/MEA/Product/All-Groups>.

---

4 Shaun Sceats, Sonya Breslin, *China and the International Human Rights System* (London: Chatham House, 2012), [http://dspace.jgu.edu.in:8080/jspui/bitstream/10739/173/1/NPHR8 China %26 Int HR.pdf](http://dspace.jgu.edu.in:8080/jspui/bitstream/10739/173/1/NPHR8%20China%20Int%20HR.pdf).  
5 Joel E. Oestreich, “UNICEF and the Implementation of the Convention on the Rights of the Child,” *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations* 4, no. 2 (July 28, 1998): 183–198, [https://brill.com/view/journals/gg/4/2/article-p183\\_5.xml](https://brill.com/view/journals/gg/4/2/article-p183_5.xml).

yang sistematis sebagai negara pemimpin dunia dalam hal “kekuatan nasional dan pengaruh internasional”.<sup>6</sup> Untuk mewujudkan optimisme tersebut, China kini menempuh strategi yang lebih ekspansif dengan mempertahankan dan memajukan globalisasi ekonomi, yang juga dicanangkan Presiden pada *World Economic Forum* di Davos 2017. Demi efisiensi dalam industri produk teknologi, China menekankan ketergantungannya yang amat besar terhadap mineral baik sebagai energi, bahan bakar dan bahkan bahan baku utama. Program *Made in China 2025* telah mendorong keinginan untuk menghasilkan teknologi listrik baterai inti yang lebih besar sehingga berakibat pada meningkatnya tuntutan pasar terhadap stok tembaga hingga 232.000 ton pada tahun 2025. Selain itu, kebutuhan masyarakat China terhadap tembaga semakin besar guna menjalankan mesin kereta api, kendaraan listrik, motor mobil dan transformator daya.<sup>7</sup>

Dalam perburuan mencari jejak mineral dan sejak model pertumbuhan China menjadi sangat padat sumber daya, Afrika menjadi kawasan utama yang menjadi mitra kerjasama China untuk bisa mengimpor bahan baku mineral.<sup>8</sup> Harmonisasi hubungan antara China dan negara-negara Afrika telah dilakukan sejak tahun 2000 yang mana China telah muncul sebagai mitra dagang terbesar Afrika. Negara-negara di Afrika menempati posisi strategis dalam pertimbangan geostrategis China karena posisi geografisnya, tanah yang subur, sumber daya mineral, hutan cadangan yang luas, dan ukuran populasi.<sup>9</sup> Oleh karena itu, negara-

negara Afrika diharapkan untuk tetap memasok bahan mentah untuk memelihara dan mendorong pertumbuhan industri dan teknologi China dalam beberapa dekade mendatang.<sup>10</sup> Selain itu, menurut *The Information Office of the China's State Council*, perdagangan adalah bentuk awal dari hubungan dan kerja sama Sino-Afrika.<sup>11</sup> China menciptakan tingkat preferensi yang tinggi di Afrika, seperti yang ditunjukkan oleh Survei Sikap *Global Pew* tahun 2015, menemukan bahwa China lebih populer di Afrika, sebaliknya China memiliki peringkat preferensi yang rendah di Asia dan Amerika Latin.<sup>12</sup>

Salah satu negara mitra China di Afrika adalah Republik Demokratik Kongo (Kongo). Kongo memang memiliki tata kelola yang tidak memadai yang ditunjukkan dengan posisinya yang berada di peringkat 156 dari 177 negara pada Indeks Persepsi Korupsi 2016.<sup>13</sup> Padahal tak bisa dipungkiri Kongo merupakan salah satu negara terkaya di dunia dalam hal sumber daya alam yang nilainya sekitar \$ 24 triliun, termasuk 3.2 triliun kaki kubik gas alam, deposit besar bijih besi, platinum, berlian, emas dan uranium, 1,062,70 kilometer persegi tanah yang dapat ditanami, dan menjadi cadangan kobalt terbesar di dunia dengan 3,5 juta metrik ton luas kobalt yang menghasilkan sekitar 55% dari pasokan pertambangan kobalt global.<sup>14</sup>

---

6 Ane Bislev, “Student-to-Student Diplomacy: Chinese International Students as a Soft Power Tool,” *Journal of Current Chinese Affairs* 46, no. 2 (2017): 81–109.  
7 K Davies, “China Investment Policy: An Update,” *OECD Working Papers on International Investment* 01 (2013).  
8 World Bank, “China’s Product Export to Middle East and North Africa.” *World Integrated Trade Solution*. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2013/TradeFlow/Export/Partner/MEA/Product/All-Groups> akses terakhir pada 20 September 2020  
9 C Kabemba, “China-Democratic Republic of Congo Relations: From a Beneficial to a Developmental Cooperation,” *African Studies Quarterly* 16 (2016): 3–4, [https://asq.africa.ufl.edu/kabemba\\_dec2016/](https://asq.africa.ufl.edu/kabemba_dec2016/).

10 R Ebeling, “Economic Armaments and China’s Global Ambitions,” *American Institute for Economic Research*, last modified 2018, accessed October 21, 2020, <https://www.aier.org/article/economic-armaments-and-Chinas-global-ambitions/>.  
11 Zhu Rongji, “Report on the Outline of the Tenth Five-Year Plan for National Economic and Social Development (2001),” *Premier of the State Council*, last modified 2010, accessed November 11, 2020, [http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special\\_11\\_5/2010-03/03/content\\_1690620.htm](http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special_11_5/2010-03/03/content_1690620.htm).  
12 David Dollar, *China’s Engagement with Africa From Natural Resources to Human Resources* (Washington: The John L. Thornton China Center at Brookings, 2016), <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Chinas-engagement-with-africa-david-dollar-july-2016.pdf>.  
13 Transparency.org, “Congo Corruption Perceptions Index,” accessed September 1, 2020, <https://www.transparency.org/en/countries/democratic-republic-of-the-congo#>.  
14 Olawale R. Olaopa and Victor Ojatorotu, “Conflict

Hubungan ekonomi timbal balik antara China dan Kongo berlandaskan pada pertukaran nilai dan manfaat di mana China akan memberikan bantuan dalam pembangunan fisik dan Kongo akan memberikan fasilitasi berupa eksplorasi mineral dan bahan tambang lainnya yang diperlukan China dalam menopang industrialisasi baterai listrik inti.<sup>15</sup> Kegiatan saling tukar nilai kemudian dituangkan dalam *Convention de Collaboration (Collaboration Agreement)* yang telah dipersiapkan sejak tahun 2007 dan diratifikasi pada tahun 2008. Perjanjian Kolaborasi itu didasarkan pada Program Kerjasama China-Afrika dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial. Sejak kerja sama dilakukan mulai tahun 2008, perjanjian tersebut diharapkan mampu menjadi alat untuk memajukan masyarakat Kongo.

Kerjasama investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaty*) eksplorasi mineral dan pembangunan infrastruktur antara China dan Kongo sudah seharusnya memuat nilai-nilai HAM internasional. Komisi sub promosi dan perlindungan HAM PBB menegaskan bawah Resolusi 2003/16 tanggal 13 Agustus 2003 oleh *Human Rights Council* telah membahas sebanyak 23 Pasal tentang relasi antara perusahaan multinasional dan transnasional, negara dan prinsip universal HAM dalam kegiatan perekonomian. Dalam resolusi ini, kegiatan perekonomian termasuk investasi asing langsung oleh korporasi multinasional/transnasional (*Foreign Direct Investment, FDI*) dalam perjanjian investasi bilateral ke dua negara wajib melakukan pendekatan yang inovatif yaitu peleburan promosi dan perlindungan nilai HAM dalam perjanjian investasi dan kegiatan yang mendukung investasi tersebut. Perspektif realisme dalam studi Hubungan Internasional menegaskan

negara sebagai aktor yang paling berpengaruh dalam tatanan sosial dan politik termasuk dalam menentukan arah kerjasama ekonomi dan investasi. Sehingga perjanjian kerjasama yang melibatkan perusahaan transnasional dan multinasional sudah harus mewakili kepentingan nasional negara. Kehadiran *transnational companies* tidak serta merta dapat lepas dari campur tangan negara. Hal ini seolah menegaskan bahwa perjuangan menegakkan hukum HAM internasional dapat sejalan dengan aktivitas investasi dan bisnis internasional termasuk investasi eksplorasi mineral.<sup>16</sup>

Namun, harapan atas terwujudnya perjanjian kerjasama bilateral dan investasi yang inovatif antara Pemerintah China dan Kongo agaknya perlu dipertanyakan. Walaupun China dan Kongo telah meratifikasi beberapa konvensi HAM internasional – seperti *Convention on the Rights of the Child, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* – komitmen pemerintah kedua negara tersebut untuk mendukung promosi dan perlindungan HAM internasional seringkali dikritik oleh masyarakat internasional dan negara anggota PBB lainnya dikarenakan kuatnya pandangan *non-interference* yang mempengaruhi kebijakan luar negeri China. Dalam hal ini, China memandang bahwa promosi dan perlindungan HAM seharusnya disesuaikan dengan kondisi internal suatu negara. Bagi pemerintah China, prinsip universalisme dalam agenda HAM tidak dapat mereduksi kepentingan nasional dan tatanan budaya yang melekat kuat pada suatu bangsa.<sup>17</sup>

---

about Natural Resources and the Prospect of Development in the Democratic Republic of Congo (KONGO),” *Journal of Social Sciences* 49, no. 3–1 (December 11, 2016): 244–256, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09718923.2016.11893618>.

15 Kabemba, “China-Democratic Republic of Congo Relations: From a Beneficial to a Developmental Cooperation.”, *African Studies Quarterly*. Vol. 16 pp 3-4. [https://asq.africa.ufl.edu/kabemba\\_dec2016/](https://asq.africa.ufl.edu/kabemba_dec2016/)

16 United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003)*, n.d., <http://hrlibrary.umn.edu/links/norms-Aug2003.html>.

17 Shaun Sceats, Sonya Breslin, *China and The International Human Rights System* (London, 2012), [http://dspace.jgu.edu.in:8080/jspui/bitstream/10739/173/1/NPHR8 China %26 Int HR.pdf](http://dspace.jgu.edu.in:8080/jspui/bitstream/10739/173/1/NPHR8%20China%20Int%20HR.pdf).

Pandangan tersebut tentunya berpotensi menghalangi upaya mewujudkan prinsip HAM universal yaitu perlindungan keadilan dan kebijakan non-diskriminatif untuk para pekerja dan anak-anak. Oleh karena itu, tulisan ini mengangkat sebuah permasalahan utama yaitu apakah perjanjian kerjasama eksplorasi mineral China di Kongo berkontribusi terhadap promosi dan perlindungan keadilan dan kebijakan non-diskriminasi bagi para pekerja dan hak anak di Kongo atau justru sebaliknya. Untuk menelaah masalah tersebut, peneliti mengacu pada perspektif neo-realisme dalam hubungan internasional.

Sebelum melanjutkan pembahasan tentang pandangan neo-realisme tentang HAM, muncul pertanyaan lainnya yaitu mengapa sebuah negara perlu memikul kewajiban hukum untuk ikut serta melindungi HAM di negara lain. Pertanyaan ini berkaitan dengan dua pandangan utama dalam disiplin hubungan internasional yang saling bertolak belakang dalam meyakini apakah kerjasama internasional dan keseimbangan kekuasaan dalam mewujudkan prinsip HAM internasional menjadi relevan untuk diupayakan di tengah realita dunia yang anarkis.

Di satu sisi, terdapat pandangan institusionalisme yang beranggapan bahwa promosi dan perlindungan HAM membutuhkan institusionalisasi kerjasama internasional agar pengarus-utamaan HAM dalam kebijakan politik luar negeri dan domestik suatu negara dapat diwujudkan secara efisien dan efektif. Kerjasama ini perlu diperkuat dengan mendirikan seperangkat aturan dan norma sehingga menjadi sebuah institusi internasional. Pandangan ini bertujuan memberikan peluang bagi suatu negara untuk ikut serta menentukan arah dan tujuan negara lainnya agar berjalan beriringan dengan prinsip universal HAM yang umumnya kerap dipromosikan oleh negara penganut paham demokrasi liberal. Untuk memperkuat ikatan negara-negara dengan institusi HAM internasional, pandangan ini menegaskan bahwa legalisasi dari kerjasama internasional di bidang HAM adalah mutlak. Legalitas kerjasama internasional dibentuk melalui sebuah

perjanjian kerjasama. Oleh karena itu, promosi dan perlindungan HAM harus diikutsertakan dalam perjanjian kerjasama – khususnya dalam hal ini adalah – kerjasama bilateral investasi agar memudahkan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional masing-masing negara.

Sementara itu, irisan antara kerjasama investasi dan nilai HAM internasional memang mulai mendapatkan sambutan positif dari beberapa pemimpin negara. Perlu diakui bahwa pada awalnya terdapat banyak pandangan tradisional yang memandang miring kemungkinan menggabungkan promosi HAM internasional sebagaimana yang tercantum dalam hukum HAM internasional ke dalam perjanjian kerjasama investasi atau perjanjian kolaborasi kegiatan ekonomi internasional lainnya. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama internasional khususnya di bidang investasi asing langsung mulai mengadopsi nilai HAM sebagai salah satu kondisi yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota kerjasama tersebut.

Sebuah publikasi penelitian di tahun 2019 oleh Zugliani memaparkan bahwa perjanjian kerjasama investasi antara Morocco dan Nigeria merupakan perjanjian kerjasama yang inovatif karena memuat misi kerjasama untuk ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economy*) dan memuat unsur promosi dan perlindungan HAM internasional. Pada bagian pembuka, perjanjian ini secara langsung menyatakan keterbukaannya dalam memandang peran kerjasama investasi yaitu untuk mendukung perlindungan HAM dan perkembangan sumber daya manusia. Meskipun hal tersebut terkesan sebagai bahasa *soft law* dan kurang tegas, perjanjian ini mendapat apresiasi karena telah menegaskan komitmen negara-negara terhadap promosi HAM internasional.<sup>18</sup>

Zugliani juga menemukan klausul HAM muncul di beberapa pasal dalam perjanjian

---

18 Niccolo Zugliani, "Human Rights in International Investment Law: The 2016 Morocco-Nigeria Bilateral Investment Treaty," *International and Comparative Law Quarterly* 68 (2019): 761–770.

kerjasama tersebut. Salah satunya adalah Pasal 18 yang menjelaskan kewajiban para investor untuk menghormati hak masyarakat di negara setempat khususnya hak-hak para pekerja sebagaimana yang diatur dalam *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights of Work*. Dengan adanya pasal tersebut, dapat dipahami bahwa negara yang terlibat, setidaknya dalam perjanjian kerjasama bilateral tersebut, memiliki tanggung jawab untuk mengontrol kegiatan investasi yang dilakukan oleh para investor di negara tujuan agar mampu untuk tidak hanya menghormati namun juga mewujudkan perlindungan HAM di negara tersebut.<sup>19</sup> Pemaparan ini mendukung pandangan institusionalisme bahwa negara-negara penyelenggara kerjasama mampu mendukung keberlanjutan proses institusionalisasi HAM dalam bingkai kerjasama bilateral investasi sebagai hasil dari rantai normatif yang telah disusun dalam rezim HAM internasional sebelumnya.

Meskipun demikian, masih ditemukan inkonsistensi dalam beberapa perjanjian kerjasama, namun tentu saja hal ini tidak menjadi fokus utama tulisan ini. Sebagai aktor utama dalam politik internasional, negara memiliki preferensi tersendiri dalam mengadopsi prinsip HAM internasional. Seperti yang ditemukan dalam perjanjian kerjasama investasi bilateral antara Canada dan Uni Eropa tahun 2016. Di dalam bagian pembuka, negara yang bersepakat tidak mencantumkan klausul yang memuat kewajiban negara untuk menjunjung HAM internasional secara spesifik. Dalam konteks ini, kedua pihak seolah telah saling percaya dengan komitmen HAM masing-masing pihak sehingga pemaparan tentang HAM tidak muncul secara gamblang. Carriga menegaskan bahwa seharusnya para investor, secara teori, lebih mengutamakan negara partner investasi yang memiliki reputasi tinggi dalam penegakan HAM. Namun, Garriga justru mengedepankan analisisnya bahwa faktor HAM bisa berdampak lebih positif bagi negara dengan indeks kepatuhan pada rezim HAM yang lebih rendah. Dengan demikian, menurut Garriga,

seharusnya perjanjian kerjasama yang melibatkan pihak yang memiliki rekam jejak promosi HAM rendah harus mengandung unsur HAM lebih tinggi. Dalam konteks ini, para investor bisa menggunakan aspek HAM khususnya komitmen pemerintah setempat dalam mematuhi prinsip dan norma HAM internasional sebagai salah satu faktor determinan dalam menyusun kebijakan dan rencana investasi.<sup>20</sup>

Studi mengenai korelasi antara kerjasama bilateral investasi eksplorasi mineral dengan promosi dan perlindungan HAM internasional antara pemerintah China dan Kongo – yang juga merupakan fokus utama tulisan ini – menjadi krusial. Studi ini berpotensi memberikan pengayaan secara teoritis dan empiris terlebih lagi dalam menguji hipotesis yang disampaikan oleh Garriga sebagaimana yang telah dijelaskan di alinea sebelumnya. Garriga berpendapat jika jejak rekam HAM suatu negara cenderung rendah, maka pemerintah negara tersebut seharusnya mampu mendorong realisasi nilai promosi dan perlindungan HAM internasional dalam perjanjian kerjasama bilateral dan implementasinya. Dalam hal ini, China dan Kongo memiliki latar belakang yang sama-sama menarik dalam konteks promosi dan perlindungan HAM di internal negara masing-masing. Dengan merujuk pada asumsi Garriga, bisa ditarik sebuah pertanyaan apakah benar negara dengan rekam jejak pelanggaran HAM di internal masing-masing negara cenderung menggunakan prinsip HAM sebagai barometer realisasi kerjasama eksplorasi dan cenderung menghasilkan perubahan positif dalam aspek HAM di negara tujuan investasi. Sehingga dapat ditarik pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana kerjasama eksplorasi mineral China di Kongo berdampak positif terhadap penegakan promosi dan perlindungan HAM internasional di Kongo.

Jika perspektif institusionalisme berkeyakinan bahwa kepatuhan negara untuk memiliki

---

19 Ibid.

---

20 Ana Carolina Garriga, "Human Rights Regimes, Reputation, and Foreign Direct Investment," *International Studies Quarterly* 60, no. 1 (2016): 160–172.

komitmen terhadap promosi dan perlindungan HAM akan mendorong institusionalisasi HAM dengan mengarus-utamakan nilai-nilai promosi HAM dalam perjanjian kerjasama investasi, maka perspektif neo-realisme justru memandang sebaliknya dengan berkeyakinan bahwa negara-negara akan lebih memilih mengutamakan hak negara (*the rights of the states*) daripada hak individu dan aspek moral dari kerjasama investasi tersebut. Menurut Kenneth Waltz, pengumpulan sumber kekuasaan bisa berasal dari kemampuan mendominasi sumber daya mineral yang kemudian dapat dioptimalkan untuk menyokong kekuatan ekonomi negara tersebut.

Dalam sudut pandang neo-realisme, kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan adalah manifestasi atas relasi kuasa dari suatu negara dengan negara lainnya yang didorong oleh *self-interest* – kepentingan negara itu sendiri. Walaupun sejak berakhirnya perang dingin, kekuatan politik dunia tengah mengalami transisi karena kehadiran *the rising powers* seperti China, Brazil dan India, neo-realisme masih skeptis dalam memandang relevansi aspek kemanusiaan dan moralitas dalam pergaulan antar negara. Sehingga, kehadiran negara-negara tersebut di tengah pusaran politik internasional diprediksi tidak banyak mempengaruhi kepatuhan aktor negara terhadap promosi HAM dikarenakan negara-negara tetap akan mengutamakan hak negara di atas hak individu. Adalah hak negara untuk mengutamakan optimalisasi kepentingan nasional yakni menjamin keamanan dan stabilitas nasional serta kemakmuran masyarakatnya sendiri dan bukan untuk memenuhi kewajiban melindungi warga negara lainnya dari kemerosotan moral. Adapun kewajiban untuk menjunjung aspek HAM akan dilakukan secara selektif berdasarkan prinsip kebijakan luar negeri dan kalkulasi rasional.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, kepatuhan dan keinginan politik untuk memegang prinsip promosi dan

perlindungan HAM dalam kerjasama investasi seringkali tidak dianggap sejalan dengan hak-hak nasional dalam mengumpulkan sebanyak mungkin sumber-sumber kekuatan. Dengan merujuk pada pandangan neo-realisme di atas, maka peneliti hendak mengurai sebuah rumusan permasalahan yakni bagaimana investasi eksplorasi mineral China berdampak terhadap promosi dan perlindungan HAM internasional di Kongo.

Dengan mengacu pada perspektif neo-realisme dalam studi hubungan internasional, peneliti memandang bahwa di tengah dunia yang anarkis, pemerintah China lebih mengutamakan optimalisasi eksplorasi mineral di Kongo daripada realisasi promosi dan perlindungan HAM internasional. Meskipun China telah meratifikasi Deklarasi Universal Piagam HAM PBB, China tetap selektif dalam melaksanakan amanat PBB tersebut dengan mengedepankan *reciprocity*. Realisasi promosi dan perlindungan HAM dalam kerjasama ini ditentukan oleh keuntungan dan kerugian yang didapat oleh kedua belah pihak.

Berbeda dengan kebanyakan negara penganut demokrasi liberal pada umumnya yang menjadikan kebebasan individu, demokratisasi, dan pemenuhan keamanan manusia sebagai salah satu prekondisi dalam inisiasi kerjasama bilateral, China seolah tak acuh dengan indikator tersebut dikarenakan kuatnya prinsip *self-orientation* dan strategi *zero-sum game* dalam relasinya dengan Republik Demokratik Kongo. Bertolak belakang dengan pandangan Garriga sebelumnya, peneliti memiliki asumsi awal bahwa dalam pandangan pemerintah China, nilai-nilai HAM termasuk perlindungan terhadap hak asasi anak-anak di Kongo bukan prioritas utama melainkan kepentingan otoritas pemerintah Kongo. Hal ini seolah menegaskan bahwa kerjasama tersebut tampaknya memiliki pengaruh yang negatif terhadap promosi dan perlindungan HAM internasional di Kongo.

---

21 Huseyn Aliyev, "Neo-Realism and Humanitarian Action from Cold War to Our Days," *The Journal of Humanitarian Assistance* (2011), <https://ssrn.com/abstract=1862005>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menyelesaikan penelitian ini, beberapa tahapan telah dirancang dan dilakukan secara sistematis. Pertama, tahapan persiapan yang meliputi identifikasi dan observasi masalah, studi literatur, dan membangun kerangka konseptual teoritis. Dalam tahapan ini, peneliti mendapat pemahaman filsafati tentang urgensi realisasi prinsip HAM di masyarakat internasional yang sangat dipengaruhi oleh kehadiran aktor negara. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemahaman realisme dalam hubungan internasional yang menekankan bahwa aturan dan norma HAM di dunia diciptakan oleh negara sebagai aktor utama dalam kancah politik internasional. Peneliti melakukan observasi masalah dengan merujuk pada beberapa pemberitaan mengenai eksplorasi mineral di Kongo yang melibatkan investor asing khususnya yang berasal dari China.

Kedua, penentuan instrument penelitian yang meliputi pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Dengan merujuk pada data yang didapat melalui studi kepustakaan atau *library research* dan data primer yang berasal dari website resmi pemerintah China dan beberapa portal media daring internasional. Adapun laman resmi pemerintah China yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: website resmi *the State Council the People's Republic of China* (<http://english.www.gov.cn>) yang mana dalam laman tersebut peneliti dapat memperoleh data dari Pemerintah China yang berkaitan dengan sistem pertahanan nasional dan hubungan dagang China dan Afrika. Untuk mendapatkan data primer lainnya, peneliti menggunakan teknik *text analysis* untuk menganalisa naskah *Convention on Collaboration between The DRC and The Group of Chinese Companies: China Railway Group Ltd Sinohydro Corporation for The Development of A Mining and An Infrastructure Project in The Congo*, perjanjian kerjasama eksplorasi antara China dan Kongo. *Text analysis* berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam melacak *word*

*frequency* dalam sebuah naskah. Untuk mencari makna dari perjanjian tersebut maka peneliti menggunakan *interpretative technique*. Di tahapan yang ketiga, peneliti melakukan reduksi data yang didapat dari baik sumber primer (dokumen resmi pemerintah yaitu perjanjian kerjasama) dan sumber sekunder (literatur sebelumnya yang melakukan pembahasan yang relevan). Selanjutnya, peneliti mulai melakukan pemaparan data dalam bentuk narasi deskriptif analitis.

Narasi dari analisa data ini merujuk pada pandangan filsafati yang terkandung dalam metodologi neo-realisme yang memandang negara sebagai aktor utama dalam setiap aktivitasnya di kancah politik internasional. Sehingga, setiap perjanjian kerjasama baik level bilateral maupun regional dan setiap keterlibatan negara dalam sebuah organisasi internasional merupakan hasil dari kebijakan rasional yang didasari pada analisa pengumpulan sumber kekuatan negara di tengah struktur politik dunia yang anarkis dan tanpa kehadiran pemerintahan global. Secara keseluruhan, peneliti berkeyakinan bahwa penggunaan naskah resmi yaitu *Collaboration Agreement* dalam penelitian ini adalah relevan. Naskah resmi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai produk yang dihasilkan oleh kedua negara yang bernegosiasi atau tawar menawar dalam relasi yang asimetris di mana China menekankan daya tawarnya, berupa kekuatan ekonomi dan teknologi dan kemampuan menyediakan pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur, atas Kongo sehingga nilai promosi HAM di Kongo tidak dianggap relevan karena akan meningkatkan beban material China. Hal ini tampak berbanding terbalik dengan apa yang diyakini oleh beberapa literatur sebelumnya yang memandang bahwa promosi dan perlindungan HAM internasional akan lebih mudah dibangun dalam kerjasama investasi ketika negara tujuan investasi justru mengalami tingkat kepatuhan HAM yang rendah. Dalam hal ini, sebuah laporan mengenai pelanggaran HAM di Kongo menjelaskan bahwa salah satu aspek pelanggaran HAM yang menonjol dan belum mampu terselesaikan dengan



baik adalah tingginya angka *child labor* di sektor pertambangan mineral artisan. Beberapa negara promotor HAM internasional seringkali mendesak upaya dan komitmen negara lainnya untuk membantu pemerintah Kongo menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>22</sup> Namun, anarkisme di kancah global seringkali mengarahkan perilaku negara-negara termasuk China untuk survival dengan cara memaksimalkan keuntungan bagi negara nya sendiri.

Oleh karena itu, terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel pertama adalah variabel terikat. Dalam hal ini, peneliti menitikberatkan pada persoalan kerjasama investasi bilateral dalam aspek eksplorasi mineral antara China dan Kongo. Variabel terikat (*dependent variable*) yang digunakan adalah pelanggaran atas nilai promosi dan perlindungan HAM dalam kerjasama investasi eksplorasi mineral antara Pemerintah China dan Kongo. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan variabel HAM adalah hak pekerja anak. Untuk menjelaskan variabel terikat tersebut, peneliti menggunakan beberapa konsep yang terkandung dalam teori neo-realisme sebagai variabel bebas (*independent variable*) yakni prinsip *win-lose solution*, *self-interest* pemerintah China dan anarkisme global yang diyakini mengakibatkan perilaku pemerintah China menjadi cenderung apatis terhadap kewajiban untuk mendukung promosi dan perlindungan hak masyarakat khususnya hak anak di Kongo.

## PEMBAHASAN

### a. *Collaboration Agreement* antara Pemerintah China dan Kongo

Kolaborasi di sektor mineral antara China dan Kongo secara resmi disahkan dalam bentuk *Collaboration Agreement* pada tahun 2008. Kedua pihak sepakat bahwa perusahaan patungan China-

Kongo akan menyediakan mineral untuk China, dan akan ditukar dengan infrastruktur kepada Kongo, didanai oleh pinjaman China Exim Bank.<sup>23</sup> Pengertian eksplorasi itu sendiri adalah semua jasa, suplai atau pekerjaan yang terkait dengan sektor pertambangan yang berhubungan langsung. dengan prospek, eksplorasi, eksploitasi tambang dan bahan mineral, termasuk pekerjaan pembangunan, konstruksi dan infrastruktur. Dalam hal ini, karena kerjasama diyakini terjadi dalam bentuk barter, maka China menginvestasikan infrastrukturnya untuk mendapatkan akses guna mengeksploitasi mineral di Kongo.<sup>24</sup>

Melalui perjanjian tersebut, kerjasama itu sendiri berbentuk *joint venture* antara perusahaan tambang Kongo sendiri, *Gécamines* (dengan 32% saham) dan konsorsium perusahaan China (dengan 68% saham).<sup>25</sup> Sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi “para pihak akan bekerja sama melalui pembentukan Penambangan Joint Venture (JV) yang akan diberikan Kongo, melalui perusahaan publiknya GECAMINES dan dengan partisipasi yang terakhir, hak dan kepemilikan atas simpanan yang merupakan subjek dari penambangan ini”. Selanjutnya Pasal 3 Ayat 4 yang berbunyi “Untuk menjamin kepada Kelompok Perusahaan China sarana pemulihan, investasi mereka di Proyek Pertambangan dan Proyek Infrastruktur. Para Pihak menetapkan pembagian modal saham *JV Mining* sebagai berikut: 68% untuk Konsorsium Perusahaan China dan 32% untuk GECAMINES Group”.

---

22 United States Department of State Bureau of Human Rights and Democracy, *Democratic Republic of the Congo 2018 Human Rights Report*, 2018, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/Democratic-Republic-of-the-Congo-2018.pdf>.

23 Johanna Jansson, *Patterns of Chinese Investment, Aid and Trade in Central Africa (Cameroon, the KONGO and Gabon)*, 2009, [http://assets.wwf.org.uk/downloads/ccs\\_central\\_africa\\_briefing\\_paper\\_august\\_2009.pdf](http://assets.wwf.org.uk/downloads/ccs_central_africa_briefing_paper_august_2009.pdf).

24 Johanna Jansson, *The Sicomines Agreement: Change and Continuity in the Democratic Republic of Congo's International Relations*, 2011, [https://media.africaportal.org/documents/saiia\\_OP\\_97.pdf](https://media.africaportal.org/documents/saiia_OP_97.pdf).

25 Johanna Jansson, “The Sicomines Agreement Revisited: Prudent Chinese Banks and Risk-Taking Chinese Companies,” *Review of African Political Economy* 40, no. 135 (March 2013): 152–162, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03056244.2013.762167>.

Perjanjian tersebut kemudian memberi konsorsium perusahaan China akses ke cadangan mineral berkualitas tinggi. Pemerintah China berharap mendapatkan 10,6 juta ton tembaga dan 627.000 ton kobalt. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 berikut ini.

*“The DRC undertakes that its public company GECAMINES will transfer to the JV Mining, the Rights and Mining Titles covering the following copper-cobalt natural deposits: Dikuluwe, Mashamba West, Junction D, Cuvette Dima, Cuvette Mashamba and Synclinal Dikuluwe Hill D containing mineral reserves estimated at approximately 10,616,070 tons of mineral, of which approximately 6,813,070 tons of copper are certain resources, approximately 626,619 tons of cobalt and, in tonnage still to be determined, all other recoverable mineral substances (Article 4, Collaboration Agreement)”*

Berdasarkan perjanjian tersebut, China memberikan pinjaman sebesar US \$ 350 juta dan US \$50 juta kepada Kongo dalam bidang infrastruktur termasuk pembangunan jalan, rel kereta api, rumah sakit, sekolah, dan pengembangan tambang. Sedangkan pinjaman di bidang infrastruktur akan terbayar dengan manfaat dari mineral yang didapat China di Kongo.<sup>26</sup> Sejak Perjanjian diratifikasi pada tahun 2014, total pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur mencapai sekitar \$459.764 juta. Pada tahun 2015, \$250 juta dialokasikan untuk proyek infrastruktur dan pada tahun 2016, total pengeluaran untuk infrastruktur adalah sekitar \$750 juta dari total \$3 miliar yang dialokasikan.<sup>27</sup> Proyek infrastruktur tidak hanya dirancang untuk mengevakuasi mineral dari lokasi penambangan, tetapi lebih ke barang publik seperti jalan, rumah sakit, dan sekolah.<sup>28</sup>

---

26 Kabemba, “China-Democratic Republic of Congo Relations: From a Beneficial to a Developmental Cooperation.”

27 Ibid.

28 Jansson, *The Sicomines Agreement: Change and Continuity in the Democratic Republic of Congo's International Relations*.

Keuntungan pertama dari operasi pertambangan di dapat pada tahun 2013 di mana sebanyak 375 juta USD keuntungan digunakan untuk membayar proyek infrastruktur prioritas yang dibangun oleh China ke Kongo. Dan 85% dari keuntungan berikutnya dari Sicomines akan digunakan untuk membayar pinjaman pertambangan diikuti dengan sisa pinjaman infrastruktur Kongo ke China. Keseimbangan 15% keuntungan di atas ambang 375 juta USD dari Sicomines akan dibagikan dengan jumlah berdasarkan pada saham pemegang saham (Pasal 12 Perjanjian Kolaborasi China-Kongo).

Dalam rantai suplai kobalt di pasar dunia itu sendiri, China menjadi pemain tunggal dengan peran “satu pintu” untuk membawa, memproses, dan mendistribusikan mineral Kongo ke pasar global. Kenyataannya, perdagangan China dengan Afrika, yang telah tumbuh dari US \$ 10 miliar pada tahun 2000 menjadi US \$ 114 miliar pada tahun 2010, menjadikan China sebagai mitra dagang terbesar di Afrika.<sup>29</sup> Statistik resmi China memperkirakan bahwa antara 2003 dan 2010, 4,8 persen dari semua FDI di luar China diarahkan ke Afrika.<sup>30</sup>

Platform kerjasama ini berhasil menjadikan China bertindak sebagai produsen kobalt terbesar yang kemudian mengekstraksi dan memproduksi kobalt dalam bentuk pembuatan baterai yang dikonsumsi dan dijual ke pasar utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan pasar domestik China sendiri. Secara tidak langsung, China mengambil peran terbesar dalam rantai pasokan kobalt, memenuhi permintaan kobalt internasional, karena meningkat lebih dari 5% per tahun.<sup>31</sup>

---

29 Information Office of the State Council The People's Republic of China, “China-Africa Economic and Trade Cooperation,” last modified 2010, [http://english.www.gov.cn/archive/white\\_paper/2014/08/23/content\\_281474982986536.htm](http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986536.htm).

30 Rongji, “Report on the Outline of the Tenth Five-Year Plan for National Economic and Social Development (2001).”

31 Amnesty International, *This Is What We Die For: Human Rights Abuses in The Democratic Republic of The Congo Power the Global Trade in Cobalt* (London: Amnesty International Ltd., 2016).

**b. Bisnis Mineral dan Inkonsistensi Pemerintah China dan Pengabaian terhadap HAM masyarakat Kongo**

Perjalanan bisnis pemerintah dan konsorsium perusahaan China di Kongo memang memberikan hasil yang menggiurkan. Performa dari kerjasama ekonomi tersebut juga berjalan sesuai harapan pemerintah China. Namun, kepentingan bisnis tersebut mengalahkan kesadaran pemerintah China tentang urgensi perlindungan HAM masyarakat lokal Kongo. Bisnis global yang berhasil dimenangkan oleh China dalam kancah pertambangan mineral dan pemasaran produk olahan menuai catatan hitam dikarenakan sederet kontradiksi. Perjanjian kolaborasi tidak seindah dibayangkan karena banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Kongo.<sup>32</sup>

Di tengah eksplorasi mineral China di Kongo, muncul masalah serius, yaitu “konflik mineral”. Jansson, Burke, dan Jiang melakukan survei ke perusahaan China yang beroperasi di sektor pertambangan Kongo selama 2008-2009 dan melaporkan bahwa skandal korupsi terjadi secara masif antara perwakilan China dan otoritas lokal Kongo. Selain itu, juga ditemukan bukti bahwa pemerintah China membolehkan praktik perburuan di bawah standar yaitu mempekerjakan anak-anak di bawah umur dalam operasi tambang di Kongo.<sup>33</sup>

Sebelum kerja sama resmi dengan China pada tahun 2008, Kongo menghadapi 50 tahun terakhir dengan stagnasi ekonomi, pemerintahan politik kleptokratis, banyak perang yang mengakibatkan jutaan korban, dan krisis kesehatan masyarakat yang sangat parah. Mereka mengalami kondisi keuangan, politik, dan sosial yang tidak stabil, tepatnya setelah perusahaan tambang terbesar

milik negara, Générale des Carrières et des Mines S.A. (Gécamines), runtuh pada tahun 1990-an.<sup>34</sup>

Gécamines sendiri adalah perusahaan pertambangan milik negara terbesar di Kongo, didirikan pada tahun 1906 dan sebelum runtuh, mereka menghasilkan 500.000 ton tembaga setiap tahun, mempekerjakan sekitar 34.000 pekerja, menjalankan pertanian, rumah sakit, dan sekolah untuk kepentingan mereka, dan merupakan kontributor terbesar ke kas negara selama tahun 1970-an dan 1980-an.<sup>35</sup> Kemudian, setelah Gécamines runtuh seiring dengan runtuhnya rezim Presiden Mobutu Sese Seko di awal tahun 1990-an, perusahaan berhenti membayar gaji dan negara tidak memiliki pendapatan apa pun, yang berdampak pada penurunan PDB negara selama waktu dan situasi menjadi tidak stabil.

Karena tingkat kemiskinan yang tinggi, masyarakat Kongo tidak memiliki penghasilan untuk hidup, dan pendapatan negara yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan munculnya *Artisanal Mining* pertama kali. Menurut dokumen resmi UU Kongo No. 007/2002 tanggal 11 Juli 2002, terkait dengan kode penambangan, *artisanal mining* diartikan “sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kongo yang melakukan proses ekstraksi dan pemekatan bahan-bahan mineral dengan menggunakan alat, metode dan proses yang bersifat artisan.<sup>36</sup> Pada kenyataannya, operasi penambangan tersebut selalu digunakan tanpa adanya mekanisasi dan dilakukan secara ilegal. Dengan demikian, karena ilegalitasnya, *Artisanal Mining* memiliki tingkat

32 Michael Hentschel, Thomas; Hruschka, Felix; Priester, *Artisanal and Small-Scale Mining: Challenges and Opportunities* (World Business Council for Sustainable Development, 2003).

33 Johanna Jansson, Christopher Burke, and Wenrang Jiang, *Chinese Companies in the Extractive Industries of Gabon & the DRC: Perceptions of Transparency*, 2009, [https://eiti.org/files/documents/Chinese\\_Companies\\_in\\_the\\_Extractive\\_Industries\\_of\\_Gabon\\_and\\_the\\_DRC\\_CCS\\_report\\_August\\_2009.pdf](https://eiti.org/files/documents/Chinese_Companies_in_the_Extractive_Industries_of_Gabon_and_the_DRC_CCS_report_August_2009.pdf).

34 Amnesty International, *This Is What We Die For” Human Rights Abuses in The Democratic Republic of The Congo Power the Global Trade in Cobalt*. <https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6231832016ENGLISH.PDF> akses pada 20 September 2020

35 Information Office of the State Council The People’s Republic of China, “China-Africa Economic and Trade Cooperation” [http://english.www.gov.cn/archive/white\\_paper/2014/08/23/content\\_281474982986536.htm](http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986536.htm).<sup>35</sup> akses terakhir pada 20 September 2020

36 Democratic of Congo Republic, “Mining and Minerals Export.Gov,” <https://www.export.gov/article?id=Congo-Democratic-Republic-Mining-and-Minerals>. Akses terakhir pada 20 September 2020

keselamatan dan perawatan kesehatan yang rendah, kualifikasi operasi yang buruk, inefisiensi dalam eksplorasi dan pengolahan produksi mineral, tingkat produktivitas yang rendah, tingkat gaji dan pendapatan yang rendah, serta kurangnya jaminan sosial.<sup>37</sup> Di sana, “konflik mineral” pertama kali muncul di Kongo sebagai pelanggaran HAM, seperti buruh anak dan lingkungan kerja yang berbahaya. Oleh karena itu, Dewan Keamanan mengutuk eksploitasi sumber daya alam Kongo secara ilegal, sesuai dengan publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2001.<sup>38</sup>

Dengan demikian, kedatangan China untuk berinvestasi di pertambangan mineral Kongo merupakan peluang yang baik bagi Kongo. Pemerintah China berjanji untuk melakukan pertukaran mineral dengan membangun infrastruktur di Kongo.<sup>39</sup> Hal tersebut juga didukung dengan adanya kepentingan China di Kongo itu sendiri, di mana mereka ingin memperoleh akses energi dan sumber daya alam, memperluas pasar infrastruktur, juga memperoleh dukungan politik yang menghambat kekuatan AS.<sup>40</sup>

Namun, setelah Perjanjian Kolaborasi diratifikasi, manfaat bagi sektor ekonomi Kongo jelas terbukti tidak seimbang dengan kondisi sosial dan pengamanan HAM, dengan pekerja anak yang masih dilibatkan di area pertambangan. Dengan keuntungan ekonomi Kongo dari kerjasamanya, kerjasama tersebut setidaknya harus bisa berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di negara tersebut. Namun kenyataannya kemiskinan

tetap tinggi, di mana 71% penduduknya hidup dengan kurang dari US \$ 1,25 per hari, dan diklasifikasikan oleh UNDP sebagai tingkat kemiskinan terparah, dimana Human Development Index (HDI) Kongo masih menduduki peringkat 2 dari bawah (186 dari 187 negara) pada tahun 2016. Kongo tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia dan gagal mencapai salah satu Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2016.<sup>41</sup> Oleh karena itu, meskipun potensinya sangat besar, sektor pertambangan saat ini hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil bagi pembangunan negara jika tidak ingin dikatakan nihil kontribusi.

Ironi lainnya, setelah China berinvestasi di negaranya, jumlah pekerja anak justru meningkat, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Mereka terlibat dalam penambangan emas, berlian tembaga dan bijih timah.<sup>42</sup> Dalam penelitian terbaru pada tahun 2014, UNICEF memperkirakan terdapat 40.000 anak yang bekerja di lokasi pertambangan China di Kongo.<sup>43</sup>

Sebagaimana didefinisikan oleh UNICEF, indikator pekerja anak di sini adalah anak-anak berusia 5 hingga 14 tahun, yang melakukan setidaknya satu hingga 42 jam kegiatan ekonomi dan pekerjaan rumah tangga gabungan.<sup>44</sup> Menurut Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 36/30 29 September 2017, masalah pekerja anak di balik eksplorasi mineral China di Kongo ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan ILO juga menganggap pertambangan sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk

---

37 Hentschel, Thomas; Hruschka, Felix; Priester, *Artisanal and Small-Scale Mining: Challenges and Opportunities*.

38 United Nations, “Security Council Condemns Illegal Exploitation of Democratic Republic of Congo’s Natural Resources,” last modified 2001, <https://www.un.org/press/en/2001/sc7057.doc.htm>.

39 Kabemba, “China-Democratic Republic of Congo Relations: From a Beneficial to a Developmental Cooperation.” [https://asq.africa.ufl.edu/kabemba\\_dec2016/](https://asq.africa.ufl.edu/kabemba_dec2016/) Akses terakhir pada 20 September 2020

40 D Brautigam, *The Dragon’s Gift, The Real Study of China in Africa* (Oxford: Oxford University Press, 2009).

41 UNDP, *Human Development for Everyone - Briefing Note for Countries on the 2016 Human Development Report - Congo (Democratic Republic of The)*, 2016.

42 UNICEF, “Child Labour,” last modified 2018, [https://www.unicef.org/protection/57929\\_child\\_labour.html](https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html). diakses pada 25 September 2020

43 X Wu, Y; Bai, “China’s Infrastructure Development Strategy in Africa: Mutual Gain? | International Centre for Trade and Sustainable Development.” <https://ictsd.iisd.org/bridges-news/bridges-africa/news/China%E2%80%99s-infrastructure-development-strategy-in-africa-mutual-gain> akses terakhir pada 22 September 2020

44 UNICEF, “Child Labour.” <https://www.unicef.org/protection/child-labour> akses terakhir pada 22 September 2020

untuk anak karena risikonya yaitu mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.<sup>45</sup>

Mengetahui hal tersebut, Lamido Sanusi selaku mantan gubernur bank sentral Nigeria, sebagai salah satu bank di Afrika yang telah berdiri sejak lama dan melewati berbagai pengalaman sejak tahun 1959, menulis bagian yang menonjol di *Financial Times* tahun 2013 dan mendesak rekan-rekan Afrika “untuk segera bangun dari realitas romantis mereka dengan China”.

*“China takes our primary goods and sells us manufactured ones. This was also the essence of colonialism... Africa is now willingly opening itself up to a new form of imperialism. China is no longer a fellow under-developed economy—it is the world’s second-biggest, capable of the same forms of exploitation as the west. It is a significant contributor to Africa’s deindustrialization and underdevelopment.”*<sup>46</sup>

Dengan merujuk pada uraian di atas, dapat dilihat bahwa kerjasama investasi eksplorasi mineral antara China dan Kongo cenderung abai terhadap nilai-nilai umum yang tercantum dalam *Universal Declaration on Human Rights*. UDHR sendiri merupakan dokumen yang menjadi tonggak sejarah hak asasi manusia, yang disusun oleh semua negara anggota PBB dengan latar belakang hukum dan budaya yang berbeda dari semua wilayah, sebagai hasil dari pengalaman Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara berjanji untuk tidak pernah lagi membiarkan kekejaman seperti yang terjadi lagi dalam konflik PD II tersebut.<sup>47</sup>

Deklarasi tersebut kemudian diproklamasikan oleh Sidang Umum PBB di Paris pada tanggal

---

45 Hentschel, Thomas; Hruschka, Felix; Priester, *Artisanal and Small-Scale Mining: Challenges and Opportunities*.

46 A Okeowo, A; Singer, M; Baldwin, J; Updike, J; Carter, M; Shechtman, “China in Africa: The New Imperialist?,” last modified 2013, <https://www.newyorker.com/news/news-desk/China-in-africa-the-new-imperialists>.

47 United Nations, *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, 1948. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> akses terakhir pada tanggal 22 September 2020

10 Desember 1948, sebagai standar umum yang digunakan untuk semua orang dan semua negara di dunia internasional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 bahwa setiap individu di manapun memiliki hak penuh atas kebebasan tanpa memandang perbedaan baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, pendapat umum, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran dan status lainnya.

Melalui pasal itu, pemerintah China seharusnya tidak lagi kaku tentang prinsipnya dalam memandang masalah hak asasi manusia. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 22, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan ekonomi sesuai dengan sumber daya masing-masing negara.<sup>48</sup> Oleh karena itu, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus sesuai dan ditujukan kepada pembangunan manusia yang dapat menjadi kontributor positif bagi masalah hak asasi manusia. Deklarasi tersebut juga menjelaskan hak anak dalam Pasal 25 Ayat 2, bahwa “Ibu dan anak berhak atas pengasuhan dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang lahir atau di luar nikah, akan menikmati perlindungan sosial yang sama”.<sup>49</sup>

Pandangan lainnya juga dikemukakan oleh ilmuwan yang melakukan penelitian tentang bisnis dan pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah dan kelompok perusahaan China di otoritas Kongo dan Negara Afrika lainnya. Salah satunya adalah laporan investigasi yang dilakukan oleh Profesor John G. Ruggie, yang di bawah mandat Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia bahwa, menyimpulkan bahwa “perusahaan-perusahaan China ini mengakui lebih sedikit hak, dan perusahaan yang berbasis di China dalam sampel ini tidak mengakui hak-hak tenaga kerja”.<sup>50</sup>

Tidak hanya melanggar UDHR, kegiatan pertambangan oleh konsorsium perusahaan China

---

48 Ibid.

49 United Nations, *Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights*, 2008.

50 John Ruggies, *Human Rights Policies of Chinese Companies: Results from A Survey* (Harvard University, 2007).

tersebut juga bertentangan dengan kesepakatan bersama tentang perlindungan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum pada Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>51</sup> CRC merupakan kesepakatan HAM internasional yang pada dasarnya membentuk konsep dan standar dasar tentang bagaimana anak dilihat dan diperlakukan, yaitu sebagai manusia dan bukan sebagai objek perawatan pasif.<sup>52</sup> Secara historis, permulaan perlindungan khusus untuk anak-anak muncul di Perancis pada pertengahan abad ke-19. Kemudian, sejak 1841, undang-undang mulai melindungi anak di tempat kerja, dan sejak 1881, undang-undang Prancis mencantumkan hak anak untuk dididik. Kemudian sejak 1919, Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai memberikan semacam ketertarikan pada konsep tersebut dan menggambarkannya sebagai pembentukan Komite Perlindungan Anak.<sup>53</sup>

China menyetujui CRC dengan menandatangani pada 29 Agustus 1990 dan meratifikasinya pada 2 Maret 1992. Dengan demikian, secara ideal, China sudah seharusnya secara jelas menunjukkan komitmen global yang luas untuk memajukan hak-hak anak, karena konvensi tersebut diyakini bersama menjadi dokumen panduan bagi setiap manusia di setiap negara.<sup>54</sup> Dalam pandangan institusionalisme, seharusnya, pemerintah China mendukung secara penuh proteksi nilai HAM di level internasional termasuk dalam bingkai kerjasama investasi bilateralnya. Di mana dalam hal ini, China seharusnya mempertimbangkan aspek HAM dan membantu Kongo dalam menyelesaikan masalah pekerja anak di Kongo, terutama mereka yang

bekerja di bisnis tambang China. Pekerja anak di bawah umur rentan akan resiko kesehatan dan keselamatan karena bahan kimia terhirup dan yang terkena langsung ke tangan, suhu udara ekstrim antara pagi, siang dan malam karena dituntut bekerja lebih dari 16 jam dan sanitasi lingkungan kerja yang buruk.

Secara spesifik, Pasal 32 CRC juga menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi anak dari pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau pendidikannya. Pasal ini juga merupakan tanda bahwa pekerjaan di tambang oleh anak-anak membahayakan kesehatan dan pendidikan mereka sehingga secara jelas melanggar konsep dan Konvensi ini.

Hak-hak dasar dan kebutuhan anak-anak yang menjadi pekerja tampak terabaikan seiring dengan meningkatnya keterlibatan anak-anak di area pertambangannya. Faktanya, data menunjukkan bahwa 40% dari seluruh pekerja di pertambangan di wilayah tersebut berusia anak-anak.<sup>55</sup> Diperkirakan ada 40.000 anak bekerja di 70.000 hingga 150.000 penambang artisanal di Kongo (RAID, 2011). Menurut data statistik from UNICEF dan ILO tahun 2013, terdapat 35,8% anak bekerja dan 37,1% anak gabungan bekerja dan sekolah di Kongo, dan dari mereka yang bekerja, 23,85% laki-laki dan 11,78% perempuan bekerja di dalam tambang, serta 4,81% laki-laki juga 2,72% anak perempuan mengolah mineral.<sup>5657</sup>

---

51 UNICEF, "Convention on the Rights of the Child," <https://www.unicef.org/crc/>. <https://www.unicef.org/child-rights-convention> akses terakhir pada tanggal 22 September 2020

52 Ibid.

53 Humanium, "Children of the Republic of Congo," last modified 2018, <https://www.humanium.org/en/republic-of-congo/>. Akses terakhir pada 22 September 2020

54 United Nations Human Rights Special Procedures, *Impacts of the International Investment Regime on Access to Justice*, 2008, [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/CCSI\\_UNWGBHR\\_InternationalInvestmentRegime.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/CCSI_UNWGBHR_InternationalInvestmentRegime.pdf). akses terakhir pada 22 September 2020

---

55 Olivier, "Child Labor in the Mines of the Democratic Republic of Congo.," last modified 2016, <https://www.humanium.org/en/child-labor-in-the-mines-of-the-democratic-republic-of-congo/>. Akses terakhir pada 22 September 2020

56 UNICEF, "Child Labour." [https://www.unicef.org/protection/57929\\_child\\_labour.html](https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html) akses terakhir pada 22 September 2020

57 International Labour Organization, *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-2016* (Geneva: International Labour Office, 2017), [https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS\\_575499/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang-en/index.htm). akses terakhir pada 22 September 2020 akses terakhir pada 22 September 2020

**c. Prinsip HAM dalam kerjasama eksplorasi mineral China dan Kongo**

Dokumen pertama yang ditelaah adalah *Programme of China-Africa on Economic and Social Development*. Peneliti menggunakan kata kunci *development* dan pembangunan manusia. Dalam Pasal 1 di perjanjian kerjasama antara China dan Afrika, disebutkan bahwa tujuan kerjasama tersebut adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development*. Dalam hal ini, *sustainable development* yang dimaksud hendaknya merujuk pada konsepsi umum yang dibahas dalam koridor UN SDGs. Untuk mewujudkan janji utamanya, mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia Kongo, Pemerintah China, dalam perjanjian ini, telah menggarisbawahi beberapa program penguatan sumber daya manusia antara lain pertukaran pelajar, peningkatan pengetahuan budaya kedua negara, dan pemberian bantuan untuk pemuda Afrika untuk melanjutkan Pendidikan di China. Hal ini dapat dilihat di Article 13, Paragraph 1.4 yang berbunyi

*“increasing cultural exchanges, particularly the exchange of visits by high-level cultural delegations and sports and art groups, setting up more art exhibitions in each other’s territory, and making a greater effort to study and promote each other’s culture.”*

Lebih lanjut, Pemerintah China juga mengungkapkan komitmen untuk meningkatkan bantuan berupa pemberian beasiswa bagi pemuda di Afrika sebagai timbal balik atas kerjasama eksplorasi pertambangan mineral sebagaimana yang tercantum dalam Article 15 paragraph 1.1 *“Grant more scholarships to African students to study in China.”*

Namun, pernyataan Pemerintah China yang ditemukan di dokumen kerjasama program antara China dan Afrika justru tidak ditemukan di dalam perjanjian kerjasama antara China dan pemerintah Kongo. Dalam perjanjian Kolaborasi 2008, penulis tidak menemukan kata kunci yang sama yang sebelumnya ditemukan dalam perjanjian

kerjasama program pembangunan ekonomi sosial antara China dan Afrika.

Peneliti menggarisbawahi bahwa dalam perjanjian tersebut, Pemerintah China lebih mengutamakan pencapaian kepentingan untuk eksplorasi mineral di Kongo. Dalam Perjanjian Kolaborasi, ditemukan penggalan kalimat yang mencerminkan tujuan global China dalam memperkuat pengaruhnya di Afrika, khususnya Kongo.

Untuk itu, dalam bagian ini peneliti menjelaskan bahwa dalam Perjanjian Kolaborasi tersebut, perilaku pemerintah China secara tidak langsung membenarkan pandangan neo-realisme bahwa kehadiran institusi internasional tidak selalu mengalahkan prioritas hak negara untuk memaksimalkan keuntungan ekonominya di tengah dunia politik global yang anarkis. Untuk menguji asumsi tersebut, peneliti menggunakan beberapa kata kunci dalam menganalisa isi naskah. Untuk melacak operasionalisasi konsep kerjasama dalam naskah kolaborasi, peneliti menggunakan variabel perdagangan, hak pekerja, anti-diskriminasi, investasi, budaya, ekonomi, dan tenaga kerja. Namun, kata kunci tersebut sulit ditemukan dalam dokumen Perjanjian Kolaborasi antara China dan Kongo. Dalam dokumen tersebut, justru ditemukan pemaparan bersifat teknis mengenai pembagian hak dan kewajiban yang lebih menitikberatkan kepentingan nasional China.

Dalam Pasal 15 Alinea 1, dijelaskan secara jelas bahwa:

*“Within 12 months of the approval of the Cooperation Project by the Chinese Government, the DRC undertakes to obtain from its Parliament the adoption of a law to secure the tax, customs and exchange rate regime applicable to the Cooperation Project, because of its specificity. If the National Parliament of the DRC does not adopt the said law within the deadline, the Group of Chinese Companies will have the right to decide to realize or terminate the present Convention.”*

Informasi yang terkandung dalam alinea tersebut tampak menggaris-bawahi kedudukan China yang tentunya lebih kuat daripada pemerintah Kongo. Pemaparan yang tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tidak memuat aturan normative mengenai hak pekerja sebagaimana yang diatur dalam *the DRC's Labor Regulation in Foreign Investment Operation* yang mengatur bahwa:

*“Employers must provide family allowances based on the number of children, and paid holidays and annual vacations, based on the years of service. Employers must also provide daily transportation for their workers or pay an allowance in areas served by public transportation.” – Labor Law 2006 (DRC, 2006).*

Sementara itu, perjanjian kerjasama investasi harus mampu mewartakan hak kedua belah pihak. Negara tujuan investasi harus mampu melindungi hak investor dan para investor juga harus mendukung perlindungan hak pekerja. Dalam konteks ini, Perjanjian kolaborasi antara Pemerintah China dan Kongo justru memuat aturan mengenai perlindungan atas hak para pekerja migran. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 Perjanjian Kolaborasi bahwa *“As part of this Cooperation Project, the DRC undertakes to facilitate the granting of visas and work permits to expatriate employees in the Democratic Republic of Congo, the infrastructure contractor and the JV Mining.”*

Akomodasi hak pekerja dalam perjanjian kerjasama investasi sudah pernah diadopsi oleh beberapa kekuatan ekonomi dunia. Dalam perjanjian kerjasama investasi mereka dengan beberapa negara berkembang, AS sebagai negara dengan kekuatan ekonomi pertama di dunia menekankan bahwa kepatuhan negara setempat dalam mengakomodasi hak para pekerja dan komitmen mereka guna menghindari pekerja anak yang akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan kerjasama investasi mereka. Organisasi supranasional seperti Uni Eropa juga telah merealisasikan institusionalisasi promosi

HAM dalam perjanjian kerjasama investasi.<sup>58</sup> Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa seolah menegaskan kewajiban untuk memberikan bantuan bagi negara yang kurang berkembang berupa akses ekspor produk yang dihasilkan juga pengurangan tarif impor. Konsesi ini dijelaskan baik dalam perundingan maupun perumusan isi perjanjian kerjasama untuk menstimulasi komitmen pemerintah setempat dalam mematuhi rezim HAM internasional khususnya yang tercantum dalam beberapa konvensi yang dipayungi oleh *International Labor Organization (ILO)*.<sup>59</sup>

Dalam kapasitasnya sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke dua di dunia, China bisa saja memiliki andil untuk memperbaiki situasi domestik suatu negara agar mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat khususnya para pekerja yang terlibat dalam kerjasama investasi China dan Kongo. Meskipun indikator dan standar universalisme HAM – khususnya konsep *responsibility to protect* – masih menjadi perdebatan, banyak pihak yang menaruh harapan kepada para donatur dan investor China untuk ikut berkontribusi terhadap perbaikan harkat dan martabat manusia di belahan negara lainnya. Adapun promosi dan perlindungan HAM yang dimaksud oleh peneliti adalah yang berkaitan dengan hak-hak investor, hak-hak pekerja dan hak-hak para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat langsung dalam kerjasama tersebut dalam hal ini adalah hak para pekerja anak.

Lebih lanjut, sebagai negara yang mulai memiliki pengaruh dalam aktivitas perekonomian dunia, China diharapkan mampu mendesain kerjasama investasi yang padat akan muatan nilai moralitas dan humanisme. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, perjanjian kerjasama lebih banyak menekankan hak-hak investasi China

---

58 Shannon Blanton and Robert G. Blanton, “A Sectoral Analysis of Human Rights and FDI: Does Industry Type Matter?,” *International Studies Quarterly* 53, no. 2 (2009): 469–493.

59 Amnesty International, *Human Rights, Trade and Investment Matters*, 2006, <https://www.amnestyusa.org/files/pdfs/hrtradeinvestmentmatters.pdf>. akses terakhir pada 22 September 2020



atas pengelolaan eksplorasi mineral di Kongo. Hak-hak investasi tersebut tentunya memberikan keuntungan bagi para investor China antara lain jaminan hak untuk mendapatkan visa kerja, pengelolaan sumber mineral dengan penguasaan atas hasil investasi sebesar lebih dari 60%.

Selain itu, minimnya daya akomodasi kerjasama investasi ini juga dipengaruhi oleh cara pandang China dalam menerjemahkan struktur politik internasional. Sebagai negara berkembang yang saat ini mengalami kemajuan ekonomi dan teknologi yang pesat China terlihat sebagai penyelamat negara berkembang dalam menghadapi struktur politik global yang anarkis. Hal ini tertuang dalam sebuah kalimat di konvensi kerjasama ekonomi China dengan negara-negara di Afrika – yang kemudian menjadi pelopor atas lahirnya kerjasama bilateral China dan Kongo tersebut – yang berbunyi bahwa kerjasama ini diliputi oleh kekhawatiran yang muncul akibat kesenjangan politik dan ekonomi global yang memantik semangat juang Pemerintah China bersama negara-negara di Afrika untuk bersama-sama membentuk tatanan politik baru dunia.

Dalam konteks ini, China menunjukkan kepentingan nasional mereka dan secara jelas tertulis dalam dokumen Perjanjian. Sebagaimana dicatat dalam laporan Global Witness di Kongo bahwa terdapat potensi konflik kepentingan yang jelas bagi China karena dengan kuatnya perjanjian tersebut China cenderung menjadi pembeli dan penjual utama mineral.

Oleh karena itu, Pemerintah China tampaknya memilih untuk mengabaikan isu HAM yang harus dibahas dalam perjanjian, sesuai dengan Human Rights Council dalam “Guiding Principles” mereka tentang penilaian dampak HAM dari perjanjian perdagangan dan investasi nomor A / HRC / 19/59 / Add.5 yang menyatakan bahwa “Negara tidak dapat mengabaikan kewajiban hak asasi manusia dalam penandatanganan perjanjian perdagangan atau investasi, baik pada tingkat multilateral atau bilateral”.<sup>60</sup>

---

60 Ebeling, “Economic Armaments and China’s Global

Perjanjian Kolaborasi sebaiknya mampu mengandung nilai-nilai normatif sebagaimana yang tertulis dalam *Convention of the Rights of the Child*. Secara spesifik, pembahasan mengenai hak pekerja, anti-diskriminasi dan perlindungan atas hak anak mendapat perhatian yang kurang dari pihak China maupun Kongo mengingat tidak ada pasal yang menegaskan kewajiban para investor ataupun pemerintah setempat.

Dalam Pasal 19 CRC, disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala macam bahaya dan perlakuan yang membahayakan baik secara fisik maupun mental. Pemerintah juga seharusnya bisa menjamin setiap anak-anak akan diperhatikan dan dilindungi dengan optimal dari kekerasan dan penyalahgunaan hak baik dari orangtuanya sendiri maupun pihak yang mengambil alih kewajiban memelihara anak-anak tersebut.<sup>61</sup> Bertentangan dengan prinsip tersebut, kerjasama eksplorasi ini justru menyaksikan 40.000 anak-anak untuk tetap bekerja di area pertambangan, membawa beban berkapasitas 20 hingga 40 kg yang tentunya masuk dalam kategori beban berat. Para pekerja anak tersebut juga berkewajiban untuk bekerja setiap hari selama 12 jam di bawah cuaca yang ekstrim tanpa pelindung wajah atau sarung tangan. Anak-anak tersebut bekerja dengan mendapat upah yang sangat rendah di mana masing-masing anak mendapat upah sebesar satu hingga dua USD per hari. Meskipun mendapat upah yang minim, para pekerja anak juga mendapat ancaman lainnya yaitu kekerasan fisik yang bisa saja terjadi jika anak-anak tersebut enggan memberikan sebagian upahnya untuk aparat keamanan setempat.<sup>62</sup>

---

Ambitions.” *American Institute for Economic Research*. <https://www.aier.org/article/economic-armaments-and-Chinas-global-ambitions/> akses terakhir pada 22 September 2020.

61 UNICEF, “Convention on the Rights of the Child.” <https://www.unicef.org/child-rights-convention> akses terakhir pada 22 September 2020

62 Amnesty International, *This Is What We Die For” Human Rights Abuses in The Democratic Republic of The Congo Power the Global Trade in Cobalt*. <https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6231832016ENGLISH.PDF> akses terakhir pada 22 September 2020.

Pekerja anak memang bukan masalah baru di Kongo namun harapan untuk mengubah masalah tersebut luput dari perhatian para pihak mengingat pemerintah China seakan menunjukkan bahwa penegakan HAM internal suatu negara tidak bersifat universal.

Selain itu, anak-anak yang bekerja di pertambangan milik konsorsium perusahaan China tidak mendapat akses kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam CRC Pasal 24. Dalam pasal tersebut, negara-bangsa yang meratifikasi memiliki kewajiban untuk menyerap prinsip universal dalam kerjasama investasi yang dilakukan baik secara bilateral maupun regional yaitu melindungi anak-anak dengan memberikan mereka akses mendapatkan informasi mengenai kesehatan mereka, fasilitas kesehatan, alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan, makanan yang bernutrisi, dan air bersih yang dapat diminum sehari-hari. Kondisi ini merupakan kewajiban negara-negara yang lebih maju untuk membantu anak-anak di negara yang kurang maju. Namun, dalam Perjanjian Kolaborasi, kewajiban itu tidak hadir sama sekali. Meskipun ada beberapa pernyataan mengenai pentingnya sarana kesehatan seperti pembangunan rumah sakit namun hal ini tentu tidaklah cukup mengingat pembangunan rumah sakit justru dibebankan kepada pemerintah Kongo.<sup>63</sup>

#### **d. Bukan *Win-Win Solution* dan Pandangan Neorealisme**

Dengan merujuk pada pemaparan di atas, adalah valid untuk kemudian menilai bahwa Pemerintah China membuat Perjanjian berdasarkan kepentingan mereka, dengan mengundang Afrika, untuk memenuhi kepentingan China di abad ke-21. Kerjasama kolaborasi ini awalnya dibangun untuk saling membantu khususnya Pemerintah China akan memberikan bantuan kepada Pemerintah Kongo dalam membangun negaranya, terlepas dari jerat kemiskinan, pemerintah yang lebih

stabil dan masyarakat yang produktif. Sehingga, kuatnya ambisi kepentingan nasional China ini menyebabkan kerjasama eksplorasi mineral yang ditukarkan dengan bantuan pembangunan infrastruktur menjadi berat sebelah. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan-kutipan dalam Perjanjian, sebagai berikut:

- a) Para Menteri berkomitmen untuk bekerja sama di semua bidang, terutama pembangunan sosial dan ekonomi, atas dasar kesetaraan dan saling menghormati dengan tujuan untuk memperbarui, mengembangkan dan memperluas kerja sama China-Afrika di abad ke-21.
- b) Para Menteri juga setuju bahwa, mengingat tatanan dunia yang tidak adil dan tidak adil saat ini. China dan negara-negara Afrika harus memosisikan diri untuk mempengaruhi pembentukan tatanan dunia baru yang akan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka. Untuk tujuan ini, mereka setuju untuk mengadopsi program yang bisa diterapkan menuju penciptaan kemitraan strategis baru untuk pembangunan berkelanjutan di abad ke-21.

Tentu, setiap negara memiliki hak penuh atas orientasi kebijakan luar negerinya. Dalam konteks ini, Pemerintah China memiliki otoritas penuh dalam mengusung agendanya. Namun, hendaknya Pemerintah China segera beradaptasi agar bisa menjadi lebih komitmen dengan berpegang teguh pada pandangan universal yang tercantum dalam UDHR. Sudah saatnya Pemerintah China untuk lebih adaptif dan peka terhadap kebutuhan domestik masyarakat Kongo yang telah lama hidup dalam bayang-bayang ketidak-stabilan baik dalam aspek sosial, ekonomi dan politik.

Kerjasama kolaborasi yang digaungkan oleh Pemerintah China tidak menunjukkan keadilan dan tidak *win-win solution*. Abad ke-21 yang disebutkan dalam Perjanjian adalah abad di mana China ingin mewujudkan keinginannya untuk menjadi “negara sosialis makmur”, seperti yang tertulis dalam Buku Putih Pemerintah berjudul Populasi dan Pembangunan China di

---

63 Olivier, “Child Labor in the Mines of the Democratic Republic of Congo.” <https://www.humanium.org/en/child-labor-in-the-mines-of-the-democratic-republic-of-congo/> akses terakhir pada 22 September 2020.

abad ke-21, di mana China harus menjadi yang terdepan khususnya dalam hal kependudukan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian dapat mengubah tatanan dan pola ekonomi dunia baru seperti yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri bahwa “Pemerintah China dengan tegas mendukung pembentukan jenis hubungan internasional baru dan sebuah tatanan internasional baru.”<sup>64</sup> Kerjasama yang *win-win solution* membutuhkan transparansi dari kedua belah pihak. Sementara itu, kerjasama tersebut dilakukan sangat tertutup dan penuh kerahasiaan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa kolaborasi ini tidak bernilai kooperatif namun eksploitatif di mana pihak Kongo kemungkinan akan menghadapi jeritan hutang luar negeri dari China karena tidak mampu melunasi biaya pinjaman dalam membangun infrastruktur.<sup>65</sup>

Selain itu, perilaku abai terhadap nilai-nilai etis dan moralisme yang ditunjukkan oleh kegiatan tambang China di Kongo tampak membenarkan pandangan neo-realisme dalam hubungan internasional. Bahwa yang paling penting dalam hubungan ekonomi antar negara adalah gagasan “keuntungan relatif”, di mana perdagangan internasional, memang, digambarkan sebagai permainan *zero-sum* di mana keuntungan satu negara adalah hilangnya keuntungan bagi negara lain.<sup>66</sup> Kaum nasionalis ekonomi juga menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk mencapai surplus perdagangan perlu dilakukan pertukaran barang manufaktur yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, dengan bahan baku yang kemudian dapat diolah kembali, dan sebagainya. Sementara

itu, pemenuhan hak-hak dasar bagi para pekerja khususnya anak-anak di bawah umur, dalam pandangan pragmatisme sempit China dan Kongo, hanya akan menambah beban para investor sehingga dipandang tidak sejalan dengan agenda kepentingan nasional.

## KESIMPULAN

Merujuk pada pertanyaan utama yaitu apakah perjanjian kerjasama antara pemerintah dan konsorsium perusahaan China dengan Pemerintah Kongo sejalan dengan prinsip HAM, maka peneliti menggarisbawahi beberapa pandangan penting. Pertama, dalam perjanjian kerjasama program pembangunan ekonomi dan sosial antara Pemerintah China dan negara-negara Afrika, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan komitmen pemerintah China untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development goals*. Salah satunya adalah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Afrika melalui pemberian bantuan pendidikan untuk masyarakat Afrika. Dalam perjanjian tersebut juga ditemukan pasal yang menjelaskan rencana pengembangan program sosial di masa depan.

Kedua, meskipun demikian, poin-poin tersebut justru tidak muncul dalam payung kerjasama bilateral antara Pemerintah China dan Kongo, yaitu Perjanjian Kolaborasi. Perjanjian tersebut justru lebih banyak menjelaskan kewajiban Pemerintah Kongo untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja migran China. Ketiga, perjanjian tersebut merupakan refleksi dari tujuan politik Pemerintah China. Sebagai negara berkembang yang mulai menjadi kekuatan ekonomi dunia, pemerintah China menampakkan kepentingan ekonominya dalam perjanjian tersebut.

Adapun peristiwa tersebut tampak membenarkan pandangan neo-realisme yang memandang bahwa kerjasama ekonomi antara China dan Kongo sebagian besar tampak tidak seimbang, dengan skala yang cenderung lebih

---

64 The State Council of The People’s Republic of China, “Quality Revolution Needed for ‘Made in China,’” last modified 2016, [http://english.gov.cn/policies/policy\\_watch/2016/08/26/content\\_281475426397196.htm](http://english.gov.cn/policies/policy_watch/2016/08/26/content_281475426397196.htm). akses terakhir pada 22 September 2020.

65 Peter Lee, “China Has a Congo Copper Headache,” last modified 2010, [http://www.atimes.com/atimes/China\\_Business/LC11Cb02.html](http://www.atimes.com/atimes/China_Business/LC11Cb02.html). akses terakhir pada 16 September 2020

66 Woods Ngaire, “International Political Economy in an Age of Globalization,” in *The Globalization of World Politics*, ed. Smith Baylis, John; Steve (London: Oxford University Press, 2001), 277–298.

menguntungkan China.<sup>67</sup> Ketidakeimbangan ini dijelaskan dalam Neo-Realisme bahwa kerjasama lebih merupakan “zero-sum game”, di mana keuntungan satu bangsa adalah kerugian bangsa lain, dan dengan prinsip dasar bahwa setiap negara berdaulat yang merdeka menganggap dirinya sebagai otoritas tertinggi dan berbuat tidak mengakui kekuatan tertinggi di atas mereka.<sup>68</sup> Selain itu, meskipun sudah ada upaya kolektif untuk mendukung institusionalisasi promosi dan perlindungan HAM di tingkat global, karakter politik internasional yang anarkis mempengaruhi perilaku dan pandangan negara untuk mematuhi rezim HAM internasional.

Dalam hal ini, peneliti menunjukkan bahwa *Collaboration Agreement 2008* sebagai variabel intervensi merupakan refleksi murni dari kepentingan nasional Pemerintah China guna menjadikannya sebagai negara sosialis modern dan sejahtera melalui investasi dan industrialisasi.

## SARAN

Dengan demikian, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur sejauh mana negara berkembang mampu mewujudkan kepatuhannya terhadap prinsip universal HAM dalam kerjasama investasi dan perdagangan. Selain itu, peneliti juga beranggapan bahwa penelitian mengenai keberhasilan kerjasama bilateral antara Pemerintah China dengan negara-negara di Afrika dalam mendorong perbaikan upaya perlindungan HAM di Afrika.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada LRPM Universitas Presiden yang telah memberikan bantuan finansial untuk penerbitan hasil penelitian ini.

---

67 Taylor Ian, *The ‘All-Weather Friend’? Sino-African Interaction in the Twenty-First Century* (London: Routledge, 2004).

68 Patricia Baylis, John;Smith, Steve;Owen, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (England: Oxford University Press, 2008).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyev, Huseyn. “Neo-Realism and Humanitarian Action from Cold War to Our Days.” *The Journal of Humanitarian Assistance* (2011). <https://ssrn.com/abstract=1862005>.
- Amnesty International. *Human Rights, Trade and Investment Matters*, 2006. <https://www.amnestyusa.org/files/pdfs/hrtradeinvestmentmatters.pdf>.
- . *This Is What We Die For” Human Rights Abuses in The Democratic Republic of The Congo Power the Global Trade in Cobalt*. London: Amnesty International Ltd., 2016.
- Baylis, John;Smith, Steve;Owen, Patricia. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. England: Oxford University Press, 2008.
- Bernal, Richard. “The Great Depression, Colonial Policy And Industrialization in Jamaica.” *Social and Economic Studies* 37, no. 1/2 (1988): 33–64.
- Bislev, Ane. “Student-to-Student Diplomacy: Chinese International Students as a Soft Power Tool.” *Journal of Current Chinese Affairs* 46, no. 2 (2017): 81–109.
- Blanton, Shannon, and Robert G. Blanton. “A Secoral Analysis of Human Rights and FDI: Does Industry Type Matter?” *International Studies Quarterly* 53, no. 2 (2009): 469–493.
- Brautigam, D. *The Dragon’s Gift, The Real Study of China in Africa*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Davies, K. “China Investment Policy: An Update.” *OECD Working Papers on International Investment* 01 (2013).
- Dollar, David. *China’s Engagement with Africa From Natural Resources to Human Resources*. Washington: The John L. Thornton China Center at Brookings, 2016. <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Chinas-engagement-with-africa-david-dollar-july-2016.pdf>.
- Ebeling, R. “Economic Armaments and China’s Global Ambitions.” *American Institute for Economic Research*. Last modified 2018. diakses pada 22 September 2020 <https://>

- www.aier.org/article/economic-armaments-and-Chinas-global-ambitions/.
- Garriga, Ana Carolina. "Human Rights Regimes, Reputation, and Foreign Direct Investment." *International Studies Quarterly* 60, no. 1 (2016): 160–172.
- Hentschel, Thomas; Hruschka, Felix; Priester, Michael. *Artisanal and Small-Scale Mining: Challenges and Opportunities*. World Business Council for Sustainable Development, 2003.
- Humanium. "Children of the Republic of Congo." Last modified 2018. <https://www.humanium.org/en/republic-of-congo/>.
- Ian, Taylor. *The 'All-Weather Friend'? Sino-African Interaction in the Twenty-First Century*. London: Routledge, 2004.
- Information Office of the State Council The People's Republic of China. "China-Africa Economic and Trade Cooperation." Last modified 2010. [http://english.www.gov.cn/archive/white\\_paper/2014/08/23/content\\_281474982986536.htm](http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986536.htm).
- International Labour Organization. *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-2016*. Geneva: International Labour Office, 2017. [https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS\\_575499/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm).
- Jansson, Johanna. *Patterns of Chinese Investment, Aid and Trade in Central Africa (Cameroon, the DRC and Gabon)*, 2009. [http://assets.wwf.org.uk/downloads/ccs\\_central\\_africa\\_briefing\\_paper\\_august\\_2009.pdf](http://assets.wwf.org.uk/downloads/ccs_central_africa_briefing_paper_august_2009.pdf).
- . *The Sicomines Agreement: Change and Continuity in the Democratic Republic of Congo's International Relations*, 2011. [https://media.africaportal.org/documents/saiia\\_OP\\_97.pdf](https://media.africaportal.org/documents/saiia_OP_97.pdf).
- . "The Sicomines Agreement Revisited: Prudent Chinese Banks and Risk-Taking Chinese Companies." *Review of African Political Economy* 40, no. 135 (March 2013): 152–162. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03056244.2013.762167>.
- Jansson, Johanna, Christopher Burke, and Wenrang Jiang. *Chinese Companies in the Extractive Industries of Gabon & the DRC: Perceptions of Transparency*, 2009. [https://eiti.org/files/documents/Chinese\\_Companies\\_in\\_the\\_Extractive\\_Industries\\_of\\_Gabon\\_and\\_the\\_DRC.\\_CCS\\_report\\_August\\_2009.pdf](https://eiti.org/files/documents/Chinese_Companies_in_the_Extractive_Industries_of_Gabon_and_the_DRC._CCS_report_August_2009.pdf).
- Kabemba, C. "China-Democratic Republic of Congo Relations: From a Beneficial to a Developmental Cooperation." *African Studies Quarterly* 16 (2016): 3–4. [https://asq.africa.ufl.edu/kabemba\\_dec2016/](https://asq.africa.ufl.edu/kabemba_dec2016/).
- Lee, Peter. "China Has a Congo Copper Headache." Last modified 2010. Accessed September 16, 2020. [http://www.atimes.com/atimes/China\\_Business/LC11Cb02.html](http://www.atimes.com/atimes/China_Business/LC11Cb02.html).
- Ngaire, Woods. "International Political Economy in an Age of Globalization." In *The Globalization of World Politics*, edited by Smith Baylis, John; Steve, 277–298. London: Oxford University Press, 2001.
- Oestreich, Joel E. "UNICEF and the Implementation of the Convention on the Rights of the Child." *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations* 4, no. 2 (July 28, 1998): 183–198. [https://brill.com/view/journals/gg/4/2/article-p183\\_5.xml](https://brill.com/view/journals/gg/4/2/article-p183_5.xml).
- Okeowo, A.; Singer, M.; Baldwin, J.; Updike, J.; Carter, M.; Shechtman, A. "China in Africa: The New Imperialist?" Last modified 2013. <https://www.newyorker.com/news/news-desk/China-in-africa-the-new-imperialists>.
- Olaopa, Olawale R., and Victor Ojajorotu. "Conflict about Natural Resources and the Prospect of Development in the Democratic Republic of Congo (DRC)." *Journal of Social Sciences* 49, no. 3–1 (December 11, 2016): 244–256. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09718923.2016.11893618>.
- Olivier. "Child Labor in the Mines of the Democratic Republic of Congo." Last modified 2016. <https://www.humanium.org/en/child-labor-in-the-mines-of-the-democratic-republic-of-congo/>.

- Ranis, Gustav; Stewart, Frances; Ramirez, Alejandro. "Economic Growth and Human Development." *World Development* 28, no. 2 (2000): 197–219.
- Republic, Democratic of Congo. "Mining and Minerals Export.Gov." <https://www.export.gov/article?id=Congo-Democratic-Republic-Mining-and-Minerals>.
- Rongji, Zhu. "Report on the Outline of the Tenth Five-Year Plan for National Economic and Social Development (2001)." *Premier of the State Council*. Last modified 2010. Accessed November 11, 2020. [http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special\\_11\\_5/2010-03/03/content\\_1690620.htm](http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special_11_5/2010-03/03/content_1690620.htm).
- Ruggies, John. *Human Rights Policies of Chinese Companies: Results from A Survey*. Harvard University, 2007.
- Sceats, Sonya; Breslin, Shaun. *China and the International Human Rights System*. London: Chatham House, 2012. [http://dspace.jgu.edu.in:8080/jspui/bitstream/10739/173/1/NPHR8 China %26 Int HR.pdf](http://dspace.jgu.edu.in:8080/jspui/bitstream/10739/173/1/NPHR8%20China%20Int%20HR.pdf).
- . *China and The International Human Rights System*. London, 2012. [http://dspace.jgu.edu.in:8080/jspui/bitstream/10739/173/1/NPHR8 China %26 Int HR.pdf](http://dspace.jgu.edu.in:8080/jspui/bitstream/10739/173/1/NPHR8%20China%20Int%20HR.pdf).
- The State Council of The People's Republic of China. "Quality Revolution Needed for 'Made in China.'" Last modified 2016. [http://english.gov.cn/policies/policy\\_watch/2016/08/26/content\\_281475426397196.htm](http://english.gov.cn/policies/policy_watch/2016/08/26/content_281475426397196.htm).
- Transparency.org. "DRC Corruption Perceptions Index." Accessed September 1, 2020. <https://www.transparency.org/en/countries/democratic-republic-of-the-congo#>.
- UNDP. *Human Development for Everyone - Briefing Note for Countries on the 2016 Human Development Report - Congo (Democratic Republic of The)*, 2016.
- UNICEF. "Child Labour." Last modified 2018. [https://www.unicef.org/protection/57929\\_child\\_labour.html](https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html).
- . "Convention on the Rights of the Child." <https://www.unicef.org/crc/>.
- United Nations. *Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights*, 2008.
- . "Security Council Condemns Illegal Exploitation of Democratic Republic of Congo's Natural Resources." Last modified 2001. <https://www.un.org/press/en/2001/sc7057.doc.htm>.
- . *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, 1948.
- United Nations Human Rights Special Procedures. *Impacts of the International Investment Regime on Access to Justice*, 2008. [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/CCSI\\_UNWGBHR\\_InternationalInvestmentRegime.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/CCSI_UNWGBHR_InternationalInvestmentRegime.pdf).
- United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003)*, n.d. <http://hrlibrary.umn.edu/links/norms-Aug2003.html>.
- United States Department of State Bureau of Human Rights and Democracy. *Democratic Republic of the Congo 2018 Human Rights Report*, 2018. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/Democratic-Republic-of-the-Congo-2018.pdf>.
- World Bank. "China's Product Export to Middle East and Nort Africa." *World Integrated Trade Solution*. Last modified 2013. Accessed September 20, 2020. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2013/TradeFlow/Export/Partner/MEA/Product/All-Groups>.
- Wu, Y; Bai, X. "China's Infrastructure Development Strategy in Africa: Mutual Gain? | International Centre for Trade and Sustainable Development."
- Zugliani, Niccolo. "Human Rights in International Investment Law: The 2016 Morocco-Nigeria Bilateral Investment Treaty." *International and Comparative Law Quarterly* 68 (2019): 761–770.

Official Government Documents:

Convention on Collaboration Between The Democratic Republic of The Congo and The Group of Chinese Companies: China Railway Group Ltd Sinohydro Corporation for The Development of A Mining Project and An Infrastructure Project In The Democratic Republic of The Congo. (2008)

Programme for China-Africa Cooperation in Economic and Social Development. (2000).

HALAMAN KOSONG